

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan segala kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
8. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
10. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian pengaturan kesediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.

11. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan saran bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Pengamanan arsip dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
13. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
14. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Biasa/terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
17. Penentu kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kedinasan keluar dan kedalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II dan Eselon III pada instansi Balai/UPT/Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

18. Pengguna ...

18. Pengguna internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
19. Pengguna eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. memotivasi perangkat daerah agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada perangkat daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan rehabilitas arsip dapat terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
 - c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
 - d. terjaminnya ...

- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. azas dan pengorganisasian;
- b. pengamanan arsip dinamis; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV

AZAS DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 4

- (1) Azas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu azas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan azas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana prasarana.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah di klasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam akses pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamannya;

c. ketiga ...

- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda pada pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasinya informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Sarana

Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi pemerintahan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas/lemari besi untuk rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, kunci pengaman ruang dan media simpan arsip.

(3) Sarana ...

(3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
- b. sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai pada unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 8

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja daerah, antara lain:

- a. arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. arsip dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;

d. arsip ...

- d. arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan proposal file;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon;

c. arsip ...

- c. arsip yang tercipta terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

Pasal 11

Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Pasal 12

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif.

Pasal 13

Tabel klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Agustus 2018
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 137



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 137 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
UMUM						
1	001	Lambang, meliputi : a. Garuda b. Bendera kebangsaan c. Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) d. Bandir/umbul-umbul	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Rumah Tangga SETDA, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Umum.
2	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non PNS	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	003	Hari Raya/besar, meliputi : a. Nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dsb) b. Keagamaan c. Hari ulang tahun	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum.
4	004	Ucapan, meliputi: a. Terima kasih b. Selamat c. Mohon diri d. Bela sungkawa, dan lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum.
5	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum.
7	010	<p>Urusan dalam, meliputi:</p> <p>a. Gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air minum, hidrant, alarm, drainage</p> <p>b. Rumah dinas, persinggahan (mess/wisma/hotel), rumah susun.</p> <p>c. Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop dll)</p> <p>d. Pengurusan kendaraan dinas</p> <p>e. Keamanan/ketertiban kantor</p> <p>f. Perjanjian kerjasama MOU Pemda dengan instansi pemerintah, swasta</p> <p>g. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Kenegaraan dan hari-hari besar Keagamaan</p> <p>h. Kebersihan kantor</p> <p>i. Protokol (upacara bendera, tata tempat, pemasangan kepala negara/daerah, audensi, penerimaan tamu)</p> <p>j. Kerjasama</p>	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum
8	020	<p>Barang dan Jasa, meliputi :</p> <p>a. Penawaran (barang, jasa)</p> <p>b. Penawaran barang (bergerak, tidak bergerak)</p> <p>c. Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang</p>	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. SPK, kontrak/amandemen/adendum, teguran e. Surat Perintah Mulai Kerja f. Serah terima pekerjaan g. Pemeriksaan pekerjaan h. Perpanjangan waktu i. Denda j. Sanggahan k. Pemeliharaan barang/jasa l. Inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara				2. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum; 3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Bagian Pembangunan
9	020	m. ULP Barang dan Jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 4. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum;
10	020	n. Usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum;

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Bagian Pembangunan
11	030	<p>Kekayaan Daerah, meliputi :</p> <p>a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)</p> <p>b. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll)</p> <p>c. Barang persediaan dalam gudang</p> <p>d. Alat pengangkut (laut, darat, udara)</p> <p>e. Peralatan pabrik, Laboratorium</p> <p>f. Peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan)</p> <p>g. Usulan penambahan aset Daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak</p> <p>h. Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya</p> <p>i. Penghapusan aset-aset barang milik Daerah</p> <p>j. Usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda beserta pelaporannya</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>2. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum;</p> <p>3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada BPKAD</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
12	030	k. Peminjaman sarana/prasarana, gedung kantor/ barang inventaris, aset bergerak maupun tidak bergerak l. Tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban asset-asset barang milik daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum; 3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada BPKAD
13	040	Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan dan pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
14	040	Akuisisi, pengolahan dan penyimpanan bahan perpustakaan Pelestarian bahan perpustakaan Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder Transliterasi, translasi Survey kondisi bahan perpustakaan Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
15	040	Pengembangan bahan perpustakaan Pembinaan perpustakaan Pengembangan dan kerjasama perpustakaan Pembudayaan gemar membaca Penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepustakawanan, Penilaian Angka Kredit Pustakawan Pemasyarakatan bidang perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
16	040	Pembinaan Dan pengembangan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpol dan masyarakat Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip Pengembangan kelembagaan, Sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan Penyusunan kajian bidang kearsipan, pengembangan laboratorium sistem kearsipan Audit kearsipan, evaluasi dan Penilaian hasil pengawasan kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
17	040	Akuisisi arsip Penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip Penerimaan, Pemindehan dan penyerahan arsip Penelusuran dan wawancara secara lisan Penyelamatan arsip vital daerah Pengolahan fisik arsip dan informasi arsip Penyusunan indeks, guide, daftar dan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		inventaris arsip Transkripsi rekaman suara Penyusunan arsip citra daerah Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan arsip Alih Media dan Reproduksi arsip statis Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan Restorasi dan registrasi arsip Autentikasi arsip statis				
18	040	Penelusuran sumber dan wisata arsip Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan tayangan naskah sumber arsip Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan Pameran, publikasi dan pemasyarakatan kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
19	040	Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip beserta pengamanannya aset-aset arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan SubBagian Protokol pada Bagian Umum
20	040	SANDI 1. Pengamanan Persandian dan Informasi 2. Tata kelola persandian 3. Pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian 5. Pengelolaan security operation center	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Informasi & Komunikasi Publik pada Diskominfo 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
21	050	RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) , Musrenbang, Musrenbangpus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra (Rencana Strategi) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Bappeda Program Nasional RKP (Rencana Kerja Pemb.) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Pemb. Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
22	050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) KUPA(Kebijakan Umum Perub. Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gub. Atas Pandangan Fraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
23	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi Non Pemerintah Organisasi Internasional Organisasi semi pemerintah Lembaga Non Struktural Kelas Jabatan Analisis Jabatan Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan - Struktural dan Fungsional Uraian Jabatan Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian
24	060	Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas Stempel dinas dan stempel jabatan, Nama instansi pemerintah/non pemerintah, Alamat-alamat kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut Pola Hubungan Kerja, Standar Operasional Prosedur Hari dan Jam Kerja Pegawai Indeks Kepuasan Masyarakat Standard Pelayanan Inovasi Pelayanan Standard Prasarana Kerja Pegawai	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian
25	060	Akuntabilitas Kinerja Zona Integritas Reformasi Bagiankasi Budaya Kerja	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
26	070	Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian & Pengembangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
27	070	Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Informasi Nasional)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian & Pengembangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
28	070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster Kab/Kota Desa Inkubator Teknologi dan Bisnis	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian & Pengembangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
29	070	Pameran Produk Inovasi/Ristek BTC (Bisnis Teknologi Center) Rapterk (Penerapan Iptek) HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Kajian Strategis/diskusi/FGD Seminar, Workshop	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian & Pengembangan BAPPEDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
30	070	Kerjasama Penelitian Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Lokakarya Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian Kerjasama Penelitian Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah Perguruan Tinggi/Swasta	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian & Pengembangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Lembaga Swasta Nasional, LSM Lembaga International Perekayasaan Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah				
31	080	Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri) Himpunan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda Studi banding, Kunjungan kerja	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum;
32	080	Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah, 2. Bagian Humas dan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum,
33		Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi serta anjungan TMII	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian TU pada Badan Penghubung
34	090	Perjalanan dinas (SPT/ST/SPPD) meliputi : a. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Tamu asing (ke daerah, Eselon I), Gubernur, Wakil Gubernur	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Bupati, Wakil Bupati c. Laporan perjalanan pegawai, SPPD ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah d. Laporan hasil kegiatan peliputan Kunker RI, Wagub, Menteri, pejabat pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur ke daerah e. Laporan hasil peliputan kegiatan Kunker Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke Kecamatan dan desa.				2. Bagian Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga SETDA, Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum;
35	090	f. Laporan Perencanaan kegiatan Kunker Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat Pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati ke daerah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk pihak Panitia penyambutan protokoler, penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Sangat memiliki dampak mengganggu kinerja Perangkat Daerah bila ternyata berpotensi mengganggu keamanan kunjungan	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum;
36		g. Laporan perencanaan kegiatan kunker Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke Kecamatan dan desa.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pihak panitia penyambutan, protokoler penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum;
II. KEPEGAWAIAN						
37	800	Kebijakan Kepegawaian, meliputi : a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Statistik	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP
38	810	Pengadaan Pegawai, meliputi : a. Pendaftaran CPNS (Testing, Screening, Pengumuman tes dan pemanggilan, Pengujian kesehatan, Pengangkatan cpns golongan I-III) b. Pendaftaran tenaga kontrak kerja/MITRA KERJA	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Umum, Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP
39	820	Mutasi, meliputi : a. Pengangkatan CPNS b. Pengangkatan PNS golongan I-III	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP
40	820	c. Pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural Eselon I-IV	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP
41	820	d. Pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP
42	820	e. Kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kinerja dan Mutasi pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
43	820	f. Kenaikan pangkat golongan I-IV g. Pemindahan/pelimpahan/pembantuan golongan I-IV h. Lolos butuh i. Datasering dan penempatan kembali j. Wajib militer	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kinerja dan Mutasi pada BKPP
44	830	Kedudukan, meliputi : a. Peninjauan masa kerja	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kinerja dan Mutasi pada BKPP
		b. Penyesuaian pangkat/gaji golongan I-IV	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kinerja dan Mutasi pada BKPP
		c. Penghargaan ijasah (pencantuman gelar)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Diklat pada BKPP
45	840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi : a. Tunjangan (struktural/fungsional) b. Kehormatan c. Tambahan penghasilan d. Taspen, Askes, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan e. Surat dispensasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada BKPP
46	850	Cuti, meliputi : a. Tahunan b. Besar c. Sakit d. Bersalin e. Alasan penting f. Di luar tanggungan negara	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
47	860	Penilaian, meliputi : a. Penghargaan (satyalencana karya satya, kenaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada BKPP
48	860	b. Hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada BKPP 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
49	860	c. Konduite/DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Kinerja & Mutasi pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
50	860	d. Ujian dinas tingkat I I, III dan IV	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kinerja & Mutasi pada BKPP
51	860	e. Penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Kinerja dan Mutasi pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
52	860	f. Rehabilitasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
53	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. Formasi pegawai	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Formasi dan jabatan pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum / Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
54	870	b. Bezetting/daftar urut kepegawaian c. DUK Non PNS tidak tetap/ BLUD	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP. 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing pada Perangkat Daerah
55	870	d. Sistem informasi kepegawaian (NIP, KARPEG, tanda pengenal, KARSU/KARIS, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Formasi & Jabatan pada BKPP 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
56	870	e. Kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP
57	870	f. KORPRI	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
58	880	Pemberhentian, meliputi : a. Permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pensiun golongan I-IV	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kinerja dan Mutasi pada BKPP; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
59	880	b. Pensiun (janda/duda, yatim piatu)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kinerja & Mutasi pada BKPP; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
60	880	c. Karena meninggal	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kinerja & Mutasi pada BKPP; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
61	880	d. Alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kinerja & Mutasi pada BKPP 2. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pegawai
62	880	e. Tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPP
63	880	f. Pembekalan pns yang akan purna dan tali asih	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Diklat pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
64	880	g. Per pemberhentian pegawai Non PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
65	890	Pendidikan Pegawai (Tata Usaha) : a. Perencanaan program pelatihan b. Sarana Pendidikan c. Jenis diklat dan Pelaporan diklat d. Pengembangan kompetensi pegawai e. Tugas belajar (ijin belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, penempatan kembali) f. Tenaga pengajar/ narasumber g. Jurnal Ilmiah h. Penelitian i. Magang j. Short course/ in house training k. Evaluasi pasca diklat dan evaluasi narasumber	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Diklat pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
66	890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu : a. Sertifikasi Kompetensi b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengajar c. Pengendalian Mutu Diklat d. Kerjasama Penyelenggaraan Diklat e. Karya Tulis/ Lokakarya f. Kurikulum, Silabi dan Modul g. Metode Pembelajaran (kuliah, Ceramah, Simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Diklat pada BKPP
67	890	Pengembangan Kompetensi Teknis : a. Pengembangan Kompetensi /Diklat Teknis Umum b. Pengembangan Kompetensi /Teknis Inti c. Pengembangan Kompetensi/ Teknis Pilihan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Diklat pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d.Praktek Lapangan/Observasi Lapangan				
68	890	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional : a.Pengembangan Kompetensi /Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b.Pengembangan Kompetensi / Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional c.Pengembangan Kompetensi/ Diklat Teknis Jabatan Fungsional d. Praktek Lapangan/Observasi Lapangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Diklat pada BKPP
69	890	Pengembangan Kompetensi Managerial : a.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan b.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah c.Pendidikan Dasar bagi CPNS d.Visitasi/Benchmarking e Inovasi Kepemimpinan.	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Diklat pada BKPP
III. KEUANGAN						
70	900	Keuangan meliputi a. Nota Keuangan b. APBN c. APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada BPKAD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
71	910	Anggaran, meliputi : a. Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD b. DPA/DPPA/DPAL-OPD/PPKD c. Anggaran kas d. Surat Penyediaan dana (SPD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
72	920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi pada BPKAD
73	930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan pada BPKAD
74	940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
75	950	Pengelolaan kas daerah meliputi a. Laporan pemotongan IWP, taperum, pph 21 dari gaji b. Laporan rekapitulasi penerimaan daerah c. Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (ppn/pph) dari CV/PT/instansi d. Surat tanda setoran (STS) e. Laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran f. Rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha di masing-masing Perangkat Daerah
76	950	g. Laporan mutasi penempatan deposito h. Surat perintah transfer uang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
77	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota serta pertanggung jawaban APBD Kab/Kota, Edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sub. Bagian Program pada BPKAD 2.Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
78	960	Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
79	961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/ Bidang pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
80	970	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam/Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Reklame	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
81	970	Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll) Retribusi penggunaan air bawah tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Retribusi pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
82	970	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll) Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi Cukai Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pendapatan pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
83	970	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Pajak Retribusi Bunga Deposito Bunga Tabungan Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR) Sumbangan Pihak Ke Tiga (Kendaraan (Dealer), Kayu) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan Dari Dana Bergulir/Revolving Kerjasama Dengan BUMIDA Penerimaan DUKS	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
84	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan pendapatan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pendapatan BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I. PEMERINTAHAN						
1	120	PEMERINTAH KABUPATEN Monografi, Tambahkan Kode Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	120	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (Lkpj) Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi Vertikal Kerjasama Antar Daerah, Luar Provinsi dan Luar Negeri Bupati, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Dan Sebagainya Wakil Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan Dan Sebagainya Sekertaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
3	120	Penyerahan Urusan/SPM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP
4	120	Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan Penyerahan Urusan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
5	120	Pembentukan / Pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				hukum		
6	120	Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah
7	120	Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU , Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah
8	120	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah
9	120	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah
10	120	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU dan Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah
11	120	Pembagian Wilayah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU dan Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum		
12	130	Wilayah Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU dan Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah
13	140	PEMERINTAH DESA APBDes/Kel Permasalahan Batas Desa/Kelurahan Penghapusan Desa/Kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah 2. Bagian TU dan Bidang Pengembangan Desa pada Dispermades
14	160	DPRD a. Pencalonan, pengangkatan, pengambilan sumpah, pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD
15	160	b. Pemberhentian antar waktu, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan c. Alat kelengkapan dewan (pimpinan badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain/pansus) d. Persidangan (rapat-rapat : paripurna, paripurna istimewa, pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, PANSUS, komisi, gabungan komisi, konsultasi, kerja, dengar pendapat, dengar pendapat umum, pemandangan umum, fraksi) e. Fraksi (tata tertib, kode etik) f. Reses, peninjauan/kunjungan lapangan, kunjungan kerja/study banding/konsultasi g. Kesejahteraan, keuangan dan penghargaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum Sekretariat DPRD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. Hak				
16	180	Perundangan tingkat provinsi meliputi perda, peraturan gubernur /intruksi gubernur Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan daerah, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Perundangan Tingkat Desa Meliputi Peraturan Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum, SubBagian Produk Hukum Dan Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Penyuluhan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Perundangan Tingkat Desa Meliputi Keputusan Kepala Desa	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum,, Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
17	180	Perundangan tingkat provinsi meliputi Kepgub Perundangan Tingkat Kab/Kota Meliputi KepBup/KepWal Keppres, Kepmen Peradilan Umum, Peradilan Negeri Tingkat Pertama Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum,, Sub Bagian Produk Hukum dan Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Penyuluhan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
18	180	Peradilan Tata Usaha Negara	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum, Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
19	200	POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam Orde Baru Orde Reformasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
20	210	Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai /organisasi terlarang Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai /organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang Laporan umum mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
21	220	Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
22	220	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
23	220	Verifikasi dan rekomendasi hibah Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
24	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
25	240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat ,Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
26	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
27	260	ORGANISASI WANITA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
28	260	Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
29	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) Pencalonan Nomor Urut/Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu Pemilih/Daftar Pemilih Sarana (TPS,Kendaraan,Surat Suara,Kotak Suara) Pemungutan Suara/Penghitungan Suara Hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan pemenang pilkada	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Tata Pemerintahan
30	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
31	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pemantauan Pelanggaran Sengketa Panwaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat dan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol 2.Bagian Tata Pemerintahan
32	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol
33	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP
34	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP (Tibum Tranmas), Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
35	300	Pengawasan Trantibum Penegakan Pelaksanaan Perda Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawalan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Rumah Tangga ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) dan Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (Gakprokumda) pada Satpol PP
36	310	PER TAHANAN Darat, Laut, Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat
37	330	KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-hara/Demonstrasi Senjata Api/Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) dan Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (Gakprokumda) pada Satpol PP
38	330	Bahan Laporan : - Data Eks Narapidana Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/Penyelesaian Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
39	330	Hasil Pelaksanaan Monitoring Penanganan ideologi/faham lain - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang keadaan anggota Organisasi Terlarang Laporan Umum (Kondisi, Jumlah Kekuatan) mengenai Organisasi Terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Pada Kesbangpol
40	330	Bendel Rahasia Intelijen meliputi : Dokumen Faham Lain - Dokumen Gafatar - Dokumen Persebaran HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Napi teroris - Data Radikal Kanan - Data Jaringan Intelejen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Pada Kesbangpol
41	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas Pembinaan dan Diklat Pangkat/pemberhentian anggota Linmas Pendidikan/latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pendidikan/latihan MENWA Pengerahan dan pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas Santunan uang duka bagi anggota Linmas Penghargaan bagi anggota Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Satpol PP
42	340	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas Lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				hukum		
43	350	KEJAHATAN Makar/Pemberontakan/Terrorisme Pembunuhan Penganiayaan/Pencurian/Perampasan Subversi/Penyeludupan/Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial,
		Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial
44	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan, Berita Acara, MOU, Koordinasi Gunung Merapi/Gempa/Tsunami Banjir/Tanah Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
45	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan managemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD
46	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD
47	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan teknis Rekomendasi Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDALOPS Kunjungan lapangan Relawan Laporan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD
48	390	Kerjasama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pati dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada BPBD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
49	390	Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Logistik Dan Peralatan pada BPBD
50	390	Rekomendasi Bantuan Peralatan Peralatan Rapat Koordinasi PBD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Logistik Dan Peralatan pada BPBD
51	390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada BPBD
52	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dispermades 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
53	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Gotong-royong Swadaya gotong royong Pembinaan Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan kerja masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Masyarakat Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dispermades 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kelembagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perekonomian Desa Pembiayaan Pembangunan Desa Inventarisasi Data				
54	410	Petunjuk/Pembinaan/Pekembangan Pelaksanaan Pembangunan Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Sarana dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa Perlombaan Desa dan Kelurahan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga lainnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dispermades 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
55	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Disdikbud 2. Bagian Dikbudpora dan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
56	420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Pembinaan SMA/SMK/ Diksus pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
57	420	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Pendidikan Khusus pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
58	420	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK Tahun Pelajaran Hari Libur Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, Pelajar teladan, pertukaran Pelajar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Pembinaan SMA/SMK dan Diksus pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
59	420	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang SMA, SMK, Diksus pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
60	420	Sarana Pendidikan (buku, perlengkapan pendidikan) Bangunan Pendidikan (Laboratorium, Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang SMA, SMK, Dikus pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
61	420	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi) Pertukaran Guru ke Luar Negeri Sertifikasi Guru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Ketenagaan Dikbud pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
62	420	Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang BP TIKP pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
63	426	KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade) Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll) Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional) Iptek dan Industri Olah Raga Sarana Prasarana Keolahragaan Kemitraan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
64	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja Kemitraan Pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
65	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Disdikbud
66	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga Adat Kegiatan adat/tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Candi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
67	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Disdikbud 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
68	440	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan kesehatan, kesehatan masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB DOT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Kesehatan 2. Sekretariat, Bidang pada RSUD Kabupaten Pati
69	440	Jiwa Perawatan Obat-obatan (penyimpanan dan pengawasannya) Pengadaan Obat Terlarang Kelamin, HIV, AIDS, IMS Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum) IGD; ICU IBS MCU (Medical Check Up) Farmasi Laboratorium Klinik, Patologi, Anatomi, Forensik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang SDM Dan SDK, Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Keperawatan, Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Laboratorium pada RSUD Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
70	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/Laundry Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perijinan untuk Tenaga Medis Standarisasi Penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Umum, Instalasi CSSD pada RSUD Kabupaten Pati 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
71	440	Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penunjang, Instalasi Rekam Medik pada RSUD Kabupaten Pati 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
72	440	Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak BPJS JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL Jaminan lainnya Pemeriksaan obat Distribusi obat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan, SDK Dan Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, Bidang Penunjang, Bidang Keuangan, Bagian Umum, Bagian Perencanaan pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Obat Generik T.B.C Kusta Frambusia Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD Filaria Serangga				RSUD Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
73	440	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris IMA (Irama Mastcmik Akut) Hipertensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks, Mammae, Hepar, Paru dan lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pencegahan Penyakit Menular (P2M) pada Dinas Kesehatan 2. Kepala Instalasi pada RSUD Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
74	440	Epidemiology dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilanse Pestisida Pencemaran Jamban Keluarga Kesehatan Institusi Higiene sanitasi Tempat-tempat makanan minuman Sarana air minum Pestisida, insektisida Pencemaran Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid Higiene sanitasi CA. Mammae Higiene sanitasi CA. Hepar Higiene sanitasi CA. Paru Kejadian Khusus Dekopensiokardosis (serangan jantung) Asma Psikosis PPOM Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan Pengawasan Makanan Kekurangan Makanan Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok endemik (GAKI) Keperawatan Komite Medik Rawat Inap Rawat Jalan RSUD, RS Khusus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 2. Sekretariat, Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
75	440	Gizi Mutu Rumah Sakit Akreditasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Promosi Layanan Kesehatan Pendayagunaan Tenaga Medis Kegiatan Bakti Sosial Tenaga Medis TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia) Diklat Tenaga Kesehatan/Medis Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis Perlatan Kesehatan Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif Pijat Akupuntur	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Layanan RSUD Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
76	440	SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO PSBH (Problem Solving for Better Hospital) Jamu dan herbal Dukun Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 2. Tim SPI dan Mutu, Tim ISO, Bidang Layanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menular langsung				
77	440	RSU, RS Khusus PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, Perijinan pada RSUD Kabupaten Pati 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
78	440	Perijinan untuk tenaga medis meliputi surat ijin praktek dan surat ijin kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Perijinan pada RSUD Kabupaten Pati 3. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
79	450	Bantuan dibidang keagamaan Islam Peribadatan (Sholat, Zakat, Puasa, Haji/Umroh) Infaq. Shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau) Tokoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll) Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
80	450	Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) Kristen Protestan, Katholik (Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll) Mazhab, Organisasi Gerejani Hindu, Budha dan Kong Hu Cu Peribadatan Rumah Ibadah (Pura, Candi, Vihara, Klenteng) Tokoh Agama, Rohaniawan Mazhab, Organisasi Agama	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
81	460	SOSIAL Rehabilitasi Penyandang Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental/Eks Psikotik Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan/Orang Terlantar(PGOT) Anak jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
82	460	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
83	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya. Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. Veteran Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
84	460	Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan Undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
85	460	Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial : Karang taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
86	460	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
87	460	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll Masyarakat Miskin Pedesaan Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelolaan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Fakir Miskin pada Dinas sosial 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Bagian Kesejahteraan Sosial
88	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb Panti Asuhan Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus, Keluarga, Raja Krematorium	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
89	460	Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya (Trafficking, hipnotis, dll) Kesejahteraan Anak Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang pemenuhan Hak dan Perlindungan anak pada Dinas Sosial 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
90	460	Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat ,Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Sosial 2.Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
91	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi dan kependudukan pada Dispermadesdukcapil 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
92	470	TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasalahan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerjasama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi Tata ruang pemukiman transmigrasi Rancangan dan pemanfaatan areal tanah				
93	470	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan Pengerahan Pendaftaran dan seleksi calon transmigran Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
94	470	Rancangan kapling TSM Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
95	470	Pemberangkatan transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengawasan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan Penempatan Transmigran Kesiapan lokasi dan daya tampung Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti Penampungan transmigrasi (transito), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calon peserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan penjajagan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan, Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status, Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Pembinaan kesehatan Penyediaan sarana kesehatan dan KB Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa Pendistribusian bantuan pangan Pembinaan rohani				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
96	470	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial Pelayanan pos di daerah transmigrasi Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan Penilaian transmigran teladan Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
97	470	KELUARGA BERENCANA Alat Kontrasepsi Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Pos KB desa, Akseptor KB	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Keluarga Berencana, Sekretariat Advokasi KIE pada Dinas Sosial 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
98	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi (perencanaan,pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada DISKOMINFO
99	480	MEDIA MASSA Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok Perekonomian dan Perbankan Bidang lainnya Layanan Informasi/Leaflet Masukan Analisis Bupati	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Televisi Film Dokumenter Kewartawanan/Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi Kasus-kasus kewartawanan Penyalahgunaan Profesi Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers. Pers Tour Kunjungan Wartawan Asing Penyuluhan Masyarakat, Publikasi Lembaga Komunikasi Masyarakat, Lembaga Pemerintah Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan Training Fotografi, Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom				
100	480	Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Radio Pengawasan Lembaga Penyiaran Kelompok Pemantau Isi Siaran Pengkajian Isi Siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan Pemasangan Reklame Pameran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
101	480	Pendirian Information Center Pembinaan Bidang Infokom Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Statistik pada DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Wahana Komunikasi Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Bupati Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif Dialog Interaktif, Rubrik Materi /Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil Pembangunan Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers Penyuluhan Masyarakat Publikasi Training Fotografi Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom Lembaga Komunikasi Masyarakat Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan		mempunyai hak akses	kinerja Perangkat Daerah	
102	480	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
103	480	Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Pati	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang E-Government pada DISKOMINFO
104	500	PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat,Bidang pada Disdagperin 2.Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
105	500	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perizinan pada DPMPTSP
106	510	PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
107	510	Promosi perdagangan Pekan raya Pameran Pelelangan, distribusi Pemasaran Sembako Penentuan harga pokok Bina usaha dan sarana perdagangan Rencana dan program kerja Beras, Garam Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dll Pemasaran Pertokoan, Kaki Lima, Kios, Pusat Perbelanjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Promosi dan Ekspor Impor pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
108	510	Pasar Ekspor Ijin ekspor Perdagangan luar negeri Manajemen perdagangan internasional Pemberitahuan ekspor barang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
109	510	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll) Penerbitan SIUP Perpanjangan Ijin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar Pulau Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Tera dan Tera Ulang, Biaya tera, Cap tanda tera Takaran, Timbangan dan anak timbangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perizinan pada DPMPSTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
110	510	Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
111	510	Perdagangan antar pulau Aneka Usaha Perdagangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perdagangan pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
112	510	Impor Ijin Impor Pemberian ijin Pengendalian ijin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perdagangan pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
113	510	Standar Mata Dagang Impor Management Perdagangan Internasional Kegiatan Impor Pembinaan Impor Pengendalian Impor Pemantauan Impor Faktor-faktor Pendukung Pengawasan Mutu Barang Impor Penyaluran Kegiatan Impor Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero Perusahaan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
114	510	Kerjasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri Promosi dan Informasi Kerjasama Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
115	510	KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
116	510	Koperasi Non Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
117	510	Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi dan Bidang UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
118	510	Distribusi Bahan Pokok Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Angkutan Jasa Perumahan Aneka Jasa Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Koperasi dan Bidang UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
119	510	Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Badan Hukum Koperasi Penyelesaian Pembubaran Koperasi Keragaman Koperasi Pengakuan Koperasi Sekolah Amalgamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan dan Penilaian pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
120	510	Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan dan Penilaian pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
121	510	Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akuntansi Akuntansi Koperasi Pedesaan/Perkotaan Akuntansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan dan Penilaian pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
122	510	Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro Pengawasan Usaha Kecil Pengawasan Usaha Menengah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan dan Penilaian pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
123	510	Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Koperasi dan Bidang UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
124	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas Termasuk Kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Puso)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian
125	520	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian
126	520	Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
127	520	Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian
128	520	Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian
129	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat pada Dinas Pertanian 2.Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKPP
130	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian pada Dinas Pertanian
131	520	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penataan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
132	520	Tata Ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perijinan pada DPMPTSP
133	520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
134	520	Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan Penyuluh Pengembangan SDM Penyuluh Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Usaha Perikanan Penangkapan Ikan Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
135	520	Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ijin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
136	520	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon dengan Profesi Lain Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik antar nelayan Penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Kelautan Perikanan Koperasi Kapal Pengawas Perikanan Penetapan Rencana zonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
137	520	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan wanita nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
138	520	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor Hasil Perikanan Impor Hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Pengusaha perikanan Sarana Perikanan Rekomendasi ijin Usaha Perikanan (Pembenihan/ Pembesaran) Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP Perbenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Permodalan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan Obat-obatan termasuk sertifikasinya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
139	520	Kepelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bimbingan Teknis Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran TPI/PPI Kesyahbandaran Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
440	520	Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi bibit karang Garam Terumbu karang Mangrove Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Harta karun di dalam laut Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
141	520	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian
142	520	Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
143	520	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Hygieni dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Inseminasi Buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian
144	520	Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian
145	520	Perkebunan Kemitraan Kelompok Tani Usaha Perkebunan Program dan Pelaporan Monitoring Statistik Perkebunan Pembibitan / Benih Produksi Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Pemasaran Hasil Perkebunan Perlindungan Tanaman H a m a Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
146	520	Alat dan Mesin Perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer Polibag Alat Laboratorium Perkebunan Reagen Sarana/Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan; Sosialisasi;Informasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian
147	520	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Sumberdaya Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur pangan sumber pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian TU, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
148	520	Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementriaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
149	520	Distribusi Pangan & Cadangan Pangan Harga Pangan Neraca Pangan Teknisi Harga Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
150	520	Kelembagaan Keamanan Pangan Bimtek & Supervisi Kelembagaan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar Bimtek & Supervisi Pengawasan Keamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
151	520	Promosi Penganekaragaman Pangan B2SA Pengembangan Pangan Lokal Inovasi Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Bimtek & Supervisi Pangan Lokal Analisis & Kajian Potensi Pangan Lokal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
152	520	PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
153	530	PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan Industri Logam Industri Mesin/Elektronik Industri Kimia/Farmasi Industri Tekstil Industri Makanan/Minuman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perindustrian pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
154	530	Aneka Industri/Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Pemasaran hasil industri Ekspor hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan & Pengendalian pada Disdagperin 2. Subbagian Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian
155	540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perijinan Rekomendasi Kontrak Karya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
156	540	Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi baru terbarukan Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				
157	540	Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air tanah Cekungan Air Tanah(CAT):Pemetaan,Imbuhan,Lepasan Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis, Sumur Bor, Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi, Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsoran, amblesan) Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
158	540	Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Batuan WIUP Bukan Logam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus Ijin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan		serta penegak hukum		Ruang
159	550	PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Angkutan Jalan Raya Perizinan Trayek Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan 2. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi pada Bagian Perekonomian
160	550	Trayek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perizinan pada DPMPSTP 2. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi pada Bagian Perekonomian
161	550	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan 2. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
162	550	Lalu Lintas Sungai dan Danau Perizinan Laut Perkapalan Alat Angkutan Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-rambu Alur dan Kolam Pelabuhan Trayek Sarana/Kapal Kecelakaan Perhubungan Laut Pelabuhan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Pelayaran Dalam Negeri Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/Wisata Turis Pelayaran Khusus Pelabuhan Alur Layar Terminal Penumpang/kontainer Terminal Keberangkatan Penumpang Terminal Kepulangan Penumpang Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus Pergerukan/Perawatan Alur Pelayaran Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai Penjagaan Pantai & Penganggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT) Patroli Bandar Patroli Perairan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sertifikat Awak Kapal Kecelakaan, Gangguan Kecelakaan Penumpang/Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana/Prasarana Pembijakan/Penyelundupan Pencemaran Perijinan Berlayar/Ijin Pembangunan/Ijin Usaha				
163	550	Teknologi Informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO
164	550	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO
165	550	Sistem Pembinaan/Penertiban Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO
166	550	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Bagian Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha Jasa Pariwisata Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana				
167	550	Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi Pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel T a r i f Travel Service Pramu Wisata Bagian Perjalanan/Angkutan Wisata Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/Perawatan Pengembangan Fasilitas Tanah/Bangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Bagian Perekonomian
168	550	Bina Usaha Insitusi Asosiasi Lembaga Kepariwisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Bagian Perekonomian
169	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Sekretariat, Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rekrutmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW Permohonan Rekomendasi Passport Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW		akses	Daerah	2.Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
170	560	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat, Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja 2.Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
171	560	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis Pemulangan TKI/TKW Ilegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perizinan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
172	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan & Pengendalian pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
173	570	PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang pada di DPMPSTSP Kabupaten Pati
174	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang KePUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
175	600	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton Besi Profil (konstruksi) Paku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
176	600	Alumunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) S e m e n Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
177	600	Kayu Bahan penutup Atap	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya Instalansi Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Instalansi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegaduhan, Terhadap gas/explosive		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	
178	610	P E N G A I R A N Irigasi Bendungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
179	610	Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
180	610	Kantung lumpur Silf ekstretor Escope chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
181	610	Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pemasangan Saluran tertutup / terowongan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
182	610	Bangunan dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Bax Tersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan tersier Bangunan Bangunan out let Bangunan terjun Bangunan penahan banjir Gorong-gorong pembuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Talang pembuang Syphon pembuangan Bangunan lainya Jalan Jalan Inspeksi				
183	610	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jempatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
184	610	Stasiun Argo Bangunan TPI dan pasar ikan Polder Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi : Gorong-gorong Syphon Bangunan pembuangan Stasiun pompa pembuangan Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong pembuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Syphon pembuangan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Saluran Pintu Pembuangan Bangunan pembuangan Saluran Pintu Pembuangan Bangunan lainnya				
185	610	Kolom pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan Penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka air Pengendalian sungai Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok pengaman Talut K r i b Kantung Lumpur Check Dam Syphon Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan lainnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Warning System Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul K r i b Bangunan lainnya Air Permukaan (Danau,Waduk, Sungai)				
186	620	J A L A N Jalan Kabupaten Daerah Penguasaan T a n a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
187	620	Bangunan Bangunan sementara Jalan Sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan R u m a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
188	620	Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan Lapisan Pondasi bawah Lapisan Pondasi Lapisan Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan M e d i a n T a n a h Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah sampingan Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (Sempadan) Rel Pengamanan P a g a r Turap Penahan Bronjong				
189	620	Jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	620	Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (earth work) Stabilisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perkerasan (pavement) Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Buku trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas Patok-patok KM				
191	620	Patok-patok R,O,W (sempadan) Rel pengamanan Pagar Turap penahan Bronjong Daerah penguasaan Badan jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
192	620	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
194	630	Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
195	630	Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah				
196	630	Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lau lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib) Bangunan pelengkap dan pengaman				
197	640	BANGUNAN Bangunan Pemerintah: Gedung Pengadilan, Rumah Pejabat Negara, Gedung DPR, Gedung Balai Kota, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan, Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran				
198	640	Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban Atap Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu/jendela, Pintu hermonik, Pintu biasa, Pintu sorong Jendela kayu, Jendela sorong, Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
199	640	<p>FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumusan Perencanaan Teknis Pengoordinasian Fasilitas Pengadaan Tanah Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dan Santunan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Aset Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan Obyek/Subyek Redistribusi Tanah, Serta ganti kerugian Tanah dan Absente lintas Daerah Kab/Kota. Fasilitasi administrasi Pertanahan Penetapan tanah ulayat lokasinya lintas daerah Evaluasi dan Pelaporan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
200	640	<p>FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Penyediaan Rumah Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Kab/Kota Fasilitasi Penyelesaian Sengketa tanah garapan lintas daerah Kab/Kota Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kab/kota. Penyelesaian masalah tanah lintas daerah. Evaluasi dan Pelaporan.</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
201	640	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan bahan pengoordinasian. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota. Pemberian ijin lokasi. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
202	640	PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pelayanan data Teknis / Konstruksi Perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
203	640	PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Prasarana sarana Utylitas Umum Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitasi Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah Tapak Sederhana sehat bagi Masyarakat Berpernghasilan Rendah. Pelaporan di bidang Perumahan Umum.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
204	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidng Perumahan Swadaya. Pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya. Pengembangan Perumahan Swadaya. Fasilitasi dan Stimulan. Pembangunan, Pemanfaatan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
205	640	PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Penyiapan Bahan Pengoordinasian. Perencanaan Petunjuk Teknis. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Prasarana dan Sarana Utylitas Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
206	640	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITYTAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan Bahan Pengoordinasian. Pengkajian Prasarana Sarana Utylitas. Penyusunan dan Pengembangan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
207	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Pengoordinasian. Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pengkajian dan Penyusunan Inovasi. Fasilitasi Peningkatan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
208	640	PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. Perumusan Kebijakan teknis. Penyiapkan Bahan Pengoordinasian. Penyusunan Data Base. Pengelolaan Data.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam. Pemeliharaan Prasarana Sarana Uilityas Perumahan Swadaya. Pemberdayaan dan Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.				
209	650	TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan/pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (site & servei) Kepadatan Rendah (low density) Kepadatan Tinggi (high density) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri Rumah (home industri) Daerah Rekreasi (open spece) Publik Garden Sport & playing fields Open space Transportasi (tata letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
210	650	Jaringan sungai Assineering Saluran Pengumpulan Instansi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur Kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaaan Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
211	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut Konservasi Sumber Daya Alam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
212		Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan				Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
213	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
214	700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek Pengawasan Inventarisasi Asset Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi Pengawasan Pertanahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
215	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Provinsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Pemerintahan Desa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
216	720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME.	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
217	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
218	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Kebudayaan Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
219	750	BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Pengawasan Pertanian dan Perkebunan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
220	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Air Minum	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
221	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
222	780	BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpangan pejabat/PNS Persengketaan PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
223	790	BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010